

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI DESA BOTUTONUO KABUPATEN BONE BOLANGO

Juriko Abdussamad¹, Winda Putri A. Hurudji²

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

jurikoabdussamad@yahoo.co.id¹; windaputrihurudji77@gmail.com²

ABSTRAK

Provinsi Gorontalo memiliki lima Kabupaten dan satu Kota Gorontalo. Dalam menanggapi kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memaksimalkan potensi objek-objek wisata yang ada di enam daerah tersebut salah satunya di kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata yang menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik wisata alam, wisata air, wisata budaya dan lain-lain, namun untuk daerah Bone Bolango hanya terdapat dua objek wisata unggulan selain objek wisata lainnya yakni wisata alam dan wisata bahari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Hasil yang dicapai adalah aspek komunikasi yang belum terjalin dengan baik menjadi hal yang sangat perlu untuk dibenahi dalam pengembangan wisata antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat. Aspek sumber daya sudah cukup baik sementara anggaran dan fasilitas belum memadai. Aspek sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Kata kunci: **Implementasi; Kebijakan; Objek Wisata; Pariwisata**

ABSTRACT

Gorontalo Province has five regencies and one Gorontalo City. In responding to the policy of the Ministry of Tourism and Creative Economy by maximizing the potential of tourism objects in the six areas, one of them is in the district of Bone Bolango. Bone Bolango Regency is one of the areas that has interesting tourist objects that can be visited by tourists both nature tourism, water tourism, cultural tourism and others, but for the Bone Bolango area there are only two leading tourist objects besides other tourist objects, namely natural tourism and marine tourism. The purpose of this study was to determine the implementation model of tourism implementation policies in Botutonuo Village, Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach and a triangulation model. The result achieved is that the communication aspect that has not been well established is something that really needs to be addressed in tourism development between the district government and the community. The resource aspect is quite good while the budget and facilities are not adequate. Aspects of the attitude of the implementer and the structure of the bureaucracy are good, but for the follow-up of the bureaucracy with the issuance of regional regulations specifically, the government of Bone Bolango Regency must do.

Keywords: **Implementation; Policy; Tourist attraction; Tourist.**

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak potensi dan sumberdaya alam yang melimpah ruah, yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian baik untuk daerah, desa maupun perorangan. Namun dengan banyaknya potensi tersebut kadang masih ada kekayaan alam yang kurang mendapat perhatian dan pengembangan secara baik. Dalam rencana pembangunan lima tahun terakhir

pemerintah Indonesia berfokus pada infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan kepariwisataan. Penetapan kelima sektor memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (*Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017 Kemenparek RI*).

Negara Indonesia terdapat banyak ragam tempat-tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan nasional maupun manca negara, hal ini dapat dilihat dengan adanya tempat-tempat wisata yang tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengupayakan peningkatan dalam bidang pariwisata, hal ini dikerenakan negara Indonesia mempunyai potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari keindahan dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Disamping itu sektor wisata alam menjadi salah satu daya tarik investasi dan sumber pendapatan bagi negara Indonesia, karena dengan adanya objek pariwisata akan menjadi penggerak sektor ekonomi masyarakat. Dengan adanya jumlah perjalanan wisatawan nusantara secara otomatis berkorelasi dengan pendapatan nasional serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya kepariwisataan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek daya tarik wisata di Indonesia serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, seperti yang tertuang pada UU Nomor 10 tahun 2009. Hal ini pun sejalan dengan Rencana Induk Kementerian Pariwisata yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional dicapai melalui misi pembangunan kepariwisataan nasional dengan mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Seiring dengan berkembangnya pariwisata dan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan telah membawa konsekuensi tersendiri khususnya pada daerah tujuan wisata dan masyarakat lokal. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara perlu meningkatkan sektor pariwisata yang ada, dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk memajukan pariwisata (UU RI Nomor 10, 2009).

Provinsi Gorontalo memiliki 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Gorontalo. Dalam menahuti kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memaksimalkan potensi objek-objek wisata yang ada di enam daerah tersebut salah satunya di Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata yang menarik yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik wisata alam, wisata air, wisata budaya dan lain-lain, namun untuk daerah Bone

Bolango hanya terdapat dua objek wisata unggulan selain objek wisata lainnya yakni wisata alam dan wisata bahari.

Dengan adanya kekuatan otonomi daerah, kepala desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa dan pembangunan segala macam potensi yang ada di daerah tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dengan adanya regulasi tersebut maka kepala desa Botutonuo dapat mengoptimalkan peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan. Dalam pasal 3 dan 4 dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk mengatasi pengangguran, menghapus kemiskinan, serta memajukan kebudayaan dan melestarikan alam dan lingkungan sekitar” (*PERDA Bone Bolango No 12 Th 2017 Ttg Penyelenggaraan Kepariwisataan.Pdf*, n.d.).

Di samping itu dalam penyelenggaraan pariwisata yang ada di Desa Botutonuo masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi yakni: a). Kualitas sumber daya manusia (masyarakat setempat) yang masih minim dan belum mampu dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata Botutonuo, hal ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan tentang kepariwisataan, serta kurangnya penguatan kebijakan dan sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat setempat; b). Belum ada teknis pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata kepada wisatawan yang datang berkunjung; c). Belum ada tindak lanjut desa dalam bentuk PERDES untuk mengoptimalkan pendapatan melalui retribusi; d). Kurangnya peran kelembagaan (BUMDES) dalam bentuk komunikasi dan kerja sama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan CSR swasta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

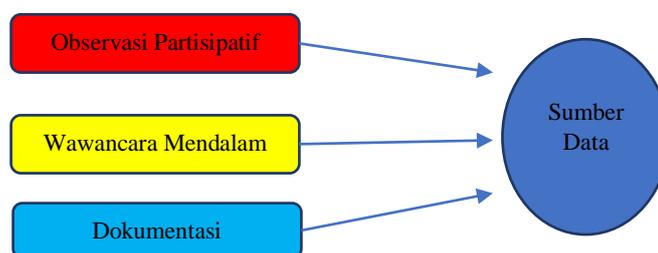
Kajian pustaka pendukung penelitian ini bagaimana mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dengan memanfaatkan ataupun mengajak masyarakat disekitar wisata untuk menjaga dan mengelola wisata tersebut. Hal ini berdampak peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk itu peran pemerintah diharapkan dapat membantu dalam hal mengelola dan memperbaiki fasilitas pendukung destinasi wisata tersebut dengan memanfaatkan pengelolaan BUMDES. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ali et al., 2018; Ardiansyah et al., 2020; Baskoro, 2018; Feki Lahamadi, Martha Ogotan, 2015; Indraningsih, 2019; Lisa et al., 2017; Lubis, 2021; Qodriyatun, 2019; Suastika, 2021). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah pada teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data Triangulasi dan lokasi pengambilan sampel penelitian.

METODE PENELITIAN

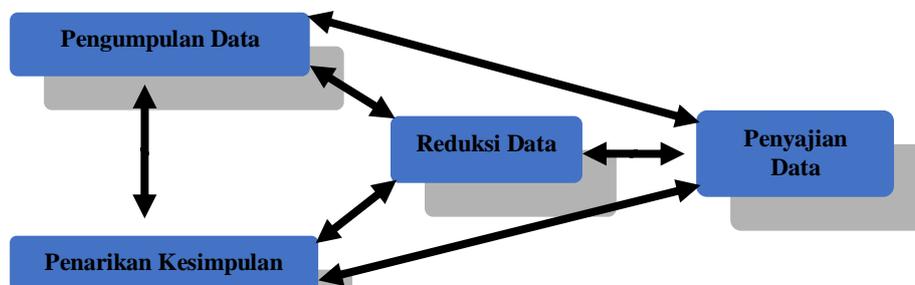
Penelitian dilaksanakan pada objek penelitian di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilokasi penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Responden yang akan diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Aparat Desa yang membidangi tentang regulasi dan sumber pendapatan desa, Kepala LPM, Kepala BPD, Tokoh Masyarakat Setempat, Pedagang Setempat, Kelompok Sadar Wisata Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data Triangulasi(Bachri, 2010) seperti pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Teknik Triangulasi

Teknik analisis data akan disesuaikan dengan jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan. Data yang diperoleh melalui pendekatan mensintesiskannya, mencari pola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta menentukan apa yang peneliti laporkan.



Gambar 2. Analisis Data Conclusion Drawing/verification

(Sugiyono, 2013) menawarkan proses pengolahan dari interpretasi data dengan model interaktif, dimana proses kualitatif biasanya melibatkan pekerjaan analisis seperti: pengerjaan data, menatanya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain. Secara runtut, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan kesimpulan atau verifikasi). Proses pengumpulan dan pengolahan serta interpretasi data dalam *interactive model* seperti terlihat pada gambar 2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

Komunikasi Yang Terjalin Antara Pemerintah Dengan Masyarakat

Mengenai komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango terkait dengan optimalisasi pariwisata, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Komunikasi yang terjalin saya rasa cukup baik karena kita sering kali kan turun kesana untuk pemetaan pengembangan wisata tersebut. Kemudian sosialisasi juga soal bagaimana retribusi wisata” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Komunikasi ini masih sulit karena salah satunya untuk pengumuman retribusi masyarakat sudah di sosialisasi selama 15 tahun ini untuk wisata botutonuo belum ada pengumuman retribusi dan perdesnya juga belum ada sebenarnya kalau mereka sadar sendiri retribusi itu kan pendapatan asli desa dan di kembalikan kepada masyarakat tapi mereka tidak sadari itu. Padahal pemerintah desa berupaya agar masyarakat itu berkembang ekonominya dengan adanya pariwisata.” (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“...Komunikasi kalau dengan pemerintah desa itu bagus, ada komunikasi karena pas pandemi kemarin juga kami yang di wilayah wisata ini kan dapat bantuan. Kalau dalam pengembangan wisata juga cukup bagus. Kalau dengan pemerintah Kabupaten itu kurang bagus karena ada kebijakan mereka yang kami ada pro dan kontra soal retribusi ini.”
(Wawancara-NH_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango terkait dengan optimalisasi pariwisata masih harus ditingkatkan terutama bagaimana pemerintah Kabupaten mengubah stigma dari masyarakat agar membuat pariwisata di Botutonuo menjadi lebih konvensional pengelolaannya agar mampu menghasilkan benefit bagi masyarakat dan pemerintah secara simultan dan berkelanjutan.

Promosi Pariwisata

Mengenai promosi pariwisata Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk banyaknya pengunjung, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Promosi dilakukan lewat media sosial dan juga berbagai event yang coba kami buat namun memang karena sekarang ini pandemi maka sulit bagi kami untuk lakukan itu” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Promosi lewat media sosial dan supaya wisatawan domestik ataupun mancanegara itu bisa kasih info ke yang lain soal wisata ini maka ada Tour Guide. Disini juga ada tour guide. Untuk mendampingi para wisatawan yang domestik yang lokal maupun dari luar kota. Itu hanya dari luar kota menggunakan jasa tour guide. Kalau org gorontalo sudah tau spot spot yang ada disini. Hanya 1 tour guide saja yang dipilih dari pemerintah kabupaten”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“....Promosi saya dengar-dengar ada lewat online ada juga dari pemerintah Kabupaten supaya banyak orang datang kesini beken kegiatan refreshing orang-orang kantor ada permainan begitu kan” (Wawancara-NH_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa promosi pariwisata Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk banyaknya pengunjung harus lebih dimaksimalkan bahkan pemerintah harus mampu untuk mengajak seluruh organisasi sektor publik di Kabupaten Bone Bolango untuk membuat kegiatan pada pariwisata di Bone Bolango saja terutama di Pantai Botutonuo agar mampu mendorong banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam

keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

Koordinasi Antara Pemerintah Desa, Masyarakat Dan Stakeholder

Mengenai koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk pengembangan kepariwisataan, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Koordinasi itu pada perencanaan pembangunan dan ada hal-hal yang perlu untuk ditinjau oleh pemerintah. Pemerintah desa sangat berharap adanya stimulus dari pemerintah Kabupaten Dinas Pariwisata supaya ini pariwisata berkembang.”
(Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Koordinasi kurang bagus yang dapat dilihat dari ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Karena mereka berpikir begini pakk semenjak 15 tahun dari awal berdirinya tempat-tempat atau apa namanya tempat tempat jualan itu kayak gajebo gajebo itu apa mereka sendiri yang mengusulkan dari awal pembangunan sampai dengan sekarang bahkan pada bulan tahun berapa itu ada terkena dampak gelombang pasang tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah provinsi kabupaten dan pemerintah diri dari Desa mereka yang berjibaku membangun sendiri misalnya minta gajebo gajebo itu tanpa ada sentuhan dari masyarakat menurut mereka dari hal-hal kecil seperti itu mereka sudah tidak percaya dengan masyarakat kira-kira kalau dari Pemerintah desa itu sendiri.”.
(Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Koordinasi itu biasanya inisiatif dari masyarakat atau pemerintah desa misalnya kan ada fasilitas yang kurang, kita buat proposal. Kemudian kalau ada perwakilan dari Dinas Pariwisata selalu ada masukan dari mereka untuk kami begitupun dari kami untuk mereka.” (Wawancara-NH_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk pengembangan kepariwisataan masih harus terjalin dengan baik antar semua pihak yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pariwisata. Koordinasi sangat perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi dan juga adanya stigma yang kurang sesuai dari salah satu pihak dalam menciptakan keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di Pantai Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

B. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi

kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

Kemampuan Masyarakat

Mengenai kemampuan masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Saya rasa masyarakat sudah mampu dan terampil terutama dalam memanfaatkan peluang. Masyarakat ini penting sekaki supaya Perda soal kepariwisataan bisa berjalan dengan bagus seperti cekatan dalam melakukan berbagai perbaikan yang ada. Intinya mereka sangat mampu karena pariwisata ini menjadi simbiosis mutualisme bagi mereka.”
(Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh pihak swasta Bank SulutGO Cabang Gorontalo bahwa:

“...Masyarakat masih belum mampu karena inovasi disana ini masih sangat minim. Saya berharap masyarakat membentuk sebuah lembaga yang kemudian dilatih oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango supaya ini pariwisata punya nilai manfaat sosial, ekonomi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah”. (Wawancara-BSG_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“....Kami mampu buktinya ini wisata kan sudah lama sekali kalau tanpa peran serta masyarakat disini kan pasti tidak bagus juga ini wisata. Kami terus berupaya ada hal-hal unik yang bisa dinikmati masyarakat pengunjung supaya mereka bisa balik lagi kesini kalau berwisata” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango sudah cukup mampu dalam memanfaatkan berbagai peluang untuk ekonomi mereka namun masih bersifat prematur dalam inovasi dimana masyarakat belum memiliki inisiatif yang tinggi agar seluruh aktivitas wisatawan di Pantai tersebut menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Kemampuan Pemerintah

Mengenai kemampuan pemerintah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari

Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Dari sisi pemerintah kita kadang kala kan terkendala regulasi dalam alokasi anggaran, kemudian ada juga yang harus kita utamakan sesuai dengan prioritas dan juga anggaran yang ada. Tapi dari aspek kemampuan untuk implementasi berbagai aturan dan baiknya pariwisata saya rasa pemerintah mampu baik dari sisi personal kompetensi pegawai hingga pada kerja samanya.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh pihak swasta Bank SulutGO Cabang Gorontalo bahwa:

“...Sudah cukup bagus tapi trade off dalam kebijakan itu kan ada. Karena pariwisata di Bone Bolango ini kan banyak juga apalagi Bone Bolango ini sudah wajib ada pemekaran karena terlalu besar jadi banyak hal yang bertahap bisa diimplementasikan atau direalisasikan”. (Wawancara-BSG_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“....Kemampuan pemerintah cukup bagus untuk pemerintah desa kemudian untuk pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harus lebih baik lagi dalam menjaga stabilitas ini wisata terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, ikon Kabupaten dan manfaat lain” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih perlu untuk ditingkatkan terutama dalam upaya untuk mengembangkan spot spot menarik bagi wisatawan agar kembali melakukan kunjungan di wisata tersebut. Kemudian harus mampu pula dalam menciptakan kerja sama dengan berbagai pihak agar lebih terlihat peran pemerintah dalam pengembangan wisata di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango

Ketersediaan Anggaran

Mengenai ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Ketersediaan anggaran masih kurang baik kan diketahui bahwa APBD dari 2020 dan 2021 banyak yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Anggaran di desa ini kan terbatas jadi untuk pariwisata lebih maju itu tidak begitu maksimal. Kami sudah konsultasi ke Dinas Pariwisata dan Dewan maka pentingnya ada Perdes soal pariwisata yang dikelola oleh desa dan BUMDes pendukung yang nantinya kan ada bagi hasil yang sesuai dengan proporsi. Hal ini kan supaya kuat dasar

pemungutan retribusi tersebut seperti di Lombongo kan ada Perda sendiri khusus Lombongo.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Anggaran untuk wisata ini semoga bisa direalisasikan setelah Covid ini selesai karena ini wisata sangat butuh sentuhan tangan pemerintah didukung dengan anggaran dalam peningkatan dan pemeliharaan fasilitas” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih sangat minim padahal pada tahun 2020 menjadi tahun anggaran yang besar bagi Panti Botutonuo untuk di revitalisasi menjadi sebuah wisata yang lebih baik namun karena adanya refocusing anggaran sehingga hal tersebut masih belum bisa di realisasikan hingga tahun 2021 ini. Sehingga kedepannya harus ada regulasi khusus untuk wisata ini agar lebih maju dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Ketersediaan Fasilitas Sarana Prasarana

Mengenai ketersediaan fasilitas sarana prasarana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Fasilitas di Botutonuo itu saya rasa masih sangat kurang karena memang wisata ini kan seperti dikelola optimal oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Kami berupaya untuk adakan anggaran pengembangannya tahun 2020 namun alokasinya diubah untuk covid-19. Insya Allah tahun-tahun mendatang bisa lebih baik lagi.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Banyak yang harus diperbaiki. Sebenarnya itu belum direhabilitasi fasilitasnya itu dari masyarakat sendiri kami cuman tapi kemarin ada penyerahan modal bumdes. Bumdes juga mengusulkan perbaikan pondok tapi bukan berarti bukan itu hasil dari tapi makan itu dikembalikan secara uang tapi ada yang mau ada yang tidak mau ada perlu adanya.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Sangat butuh perhatian karena masih minim dan tidak ada yang menarik dan unik bagi masyarakat fasilitas disini ini sehingga harus diperhatikan betul oleh semua pihak” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketersediaan fasilitas sarana prasarana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih belum memadai

sehingga wisata Botutonuo masih belum begitu banyak diminati sehingga untuk bersaing dengan wisata lainnya pihak pemerintah harus memperhatikan hal tersebut bahkan masyarakat juga harus mengambil langkah inisiatif dengan berbagai inovasi.

C. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan masalah itu. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu pada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Sikap dan Komitmen Pemerintah

Mengenai sikap dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Sikap dan komitmen kami itu pada saat RAPBD itu kami senantiasa ajukan pengembangan Botutonuo dan terus berupaya untuk mengajak para investor untuk investasi kepariwisataan di Botutonuo” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Kalau kami pemerintah desa sangat komitmen untuk anggaran desa itu 70% itu untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan pariwisata sebagai pendorong dan daya beli. Kalau untuk aparat desa jelas di pemberdayakan juga karna wisata pantai itu ada Kelompok kerja kelompok kerja disitu juga ada pengurusnya. untuk saat in kepala desa berupaya terus ..jadi kelapa desa sudah berjuang disna maupun do dewan Dan dinas dinas terkait untuk bagaimana penataan Pariwisata ini”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Sikap dan komitmen pemerintah ini terus terang harus betul-betul perhatikan dulu ini wisata karena kami masyarakat ini sudha maksimal supaya wisata ini tetap menjadi spot bagus bagi masyarakat. Jangan hanya mengandalkan pihak lain untuk kembangkan wisata

ini dan jangan hanya fokus ke jalan yang selalu rusak di Kecamatan ini. Perhatikan juga fasilitas supaya jadi daya tarik” (Wawancara-NH_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sikap dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih beragam dimana untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan DPRD Kabupaten Bone Bolango masih minim perhatian pada pengembangan wisata ini namun untuk pemerintah desa terus berkomitmen dalam pengembangan wisata namun memang anggaran yang ada masih terbatas.

Sikap dan Komitmen Masyarakat

Mengenai sikap dan komitmen masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Saya rasa bagus karena mereka saling gotong royong dalam pengembangan wisata apalagi hal itu kan dikoordinir pemerintah desa dan BUMDEs yang ada disana.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Komitmen masyarakat itu bagus namun kita sebagai pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya itu harus rangkul mereka supaya ini kebijakan pengembangan pariwisata bisa bagus. Mereka ini merasa memiliki ini wisata sehingga ada yang rusak apa begitu mereka cepat perbaiki seadanya.”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Kami ini selalu berupaya ini wisata bisa ada pengunjung terus karena kami ibu-ibu rumah tangga suka sekali kalau banyak pengunjung jadi kami punya jualan kan bisa laku. Baru kami juga selalu ramah dengan mereka pengunjung yang datang” (Wawancara-NH_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sikap dan komitmen masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih harus terus ditingkatkan meskipun sudah dalam keadaan yang baik karena selama ini masyarakat terus berupaya melakukan inovasi yang baik dimana pada tahun 2017 masyarakat membuat spot wisata pendakian gunung yang secara otomatis menarik pula minat bagi wisatawan untuk datang ke wisata Pantai Botutonuo.

D. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango Ditinjau Dari Aspek Struktur Birokrasi

Pemetaan Tugas Antar Setiap Stakeholder

Mengenai pemetaan tugas antar setiap stakeholder dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Pemetaan tugas itu sudah bagus kalau macam di proporsikan untuk pariwisata ini 40% pemerintah desa, 35% masyarakat dan pemerintah itu hanya 25%. Kemudian untuk stakholder itu kita sudah buat peta tugas yang akan dilakukan dalam pengembangan wisata ini.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Tugas masing-masing sudah jelas, dimana kami pemerintah desa pada objek wisatanya yang kami otimalkan sementara pemerintah kabupaten dan Provinsi pada aksesibilitas dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan untuk pengunjung bisa puas berwisata”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Pemetaan tugas itu harus jelas dulu, pemerintah desa bagaimana dan kalau sudah ada coba kase kuat dengan perdes supaya kan kami masyarakat juga sennag karena apa yang dikembangkan bisa dinikmati secara legal disini kan.” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemetaan tugas antar setiap stakeholder dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango sudah mulai bagus karena selama ini pemerintah desa fokus pada wilayah spot wisata dan untuk pemerintah kabupaten dan Provinsi fokus pada aksesibilitas yang kadangkala bermasalah. Sehingga kedepannya perlu ada upaya untuk lebih mengembangkan kapasitas dari masing-masing stakeholder dalam mengupayakan adanya keberhasilan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango

Peran Pemerintah dalam Memanfaatkan CSR Swasta

Mengenai peran pemerintah dalam memanfaatkan CSR swasta untuk pengembangan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yang lebih baik, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Kami ini seperti orang buang malu kalau ke swasta memang karena kita himbau mereka untuk keuntungannya itu kalau bisa digunakan untuk pengembangan wisata atau bantu masyarakat disana kalau bisa kegiatannya buat disana.” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh pihak swasta Bank SulutGO Cabang Gorontalo bahwa:

“...Kalau dengan kami cukup bagus karena kan Bone Bolango itu cukup besar sahamnya di Bank SulutGo jadi memang kalau memungkinkan kami aktif dalam memberikan CSR untuk pariwisata tapi tidak juga harus Botutonuo. Awal-awal pak Hamin Bupati itu Bank Sulut ada, tapi kan setelah itu CSR untuk wisata-wisata lain lagi sesuai bagaimana Dinas Pariwisata”. (Wawancara-BSG_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Peran pemerintah supaya bisa membuat usaha-usaha, perusahaan dan investor ini wajib untuk kembangkan wisata sebagian kecil keuntungannya. Pemerintah sudah berupaya soal itu tapi kurun 7 tahun ini sudah kurang” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa peran pemerintah dalam memanfaatkan CSR swasta untuk pengembangan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango sudah dilakukan dengan baik dimana selama ini swasta sering andil dalam pemberiajn fasilitas untuk wisata yang ada di Kabupaten Bolango. Kemudian juga swasta juga melakukan gelaran kegiatan family gathering sering kali menggunakan Pantai Botutonuo sebagai sasaran untuk kegiatan tersebut.

Standar Operasional Prosedur

Mengenai standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango, berikut ini pernyataan dari Kepala Seksi Penataan Objek dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Soal SOP ini pada dasarnya SOP itu sesuai dengan pemetaan tugas statkeholder. Banyak yang berpikiran bahwa peran pemerintah ini kurang dalam pengembangan wisata ini. Perlu diingat ya, jalan ke wisata Bone Pesisir itu banyak rintangan soal aksesibilitas seperti jalan dan lain-lain sehingga kita fokus anggaran kesitu dulu sehingga untuk destinasi kita harap jadi tugas desa supaya bisa mengembangkan ekonomi desa” (Wawancara-KSP_Juli-2021)

Pernyataan lain diungkapkan oleh Pemerintah Desa di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango bahwa:

“...Standar operasional jelas ada namun masih minim implementasinya dimana untuk perbaikan sarana dan prasarana wisata ini masih sangat butuh inisiatif dari Dinas Pariwisata untuk turun langsung kesini kemudian alokasikan anggaran”. (Wawancara-PD_Juli-2021)

Selain pernyataan dari pemerintah, pernyataan mengenai topik ini juga diungkapkan oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata Pantai Botutonuo berikut ini:

“.....Dalam hal apa ini SOP kalau masuk kesini tidak ada SOP, kalau pengembangan SOP nya kan harus buat perencanaan dulu dan harus ada inisiatif dari pemerintah Kabupaten.

Sudha cukup inisiatif pemerintah desa dan masyarakat disini tapi belum ada realisasi yang sesuai dengan harapan” (Wawancara-YS_Juli-2021)

Pernyataan dari seluruh informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango mampu memberikan efek yang cukup baik dalam peningkatan keberhasilan kebijakan kepariwisataan dimana adanya SOP dalam pengelolaan wisata maka wisata tersebut mampu untuk terus bertahan. Kedepannya untuk baiknya SOP ini maka pengembangan wisata Botutonuo harus seperti wisata Lombongo dimana telah dibuatkan Perda sendiri yang kemudian pemerintah desa akan tindak lanjuti dengan Perdes sehingga mampu berkontribusi nyata dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan penerimaan PDRB bagi Kabupaten Bone Bolango.

HASIL PEMBAHASAN

Sukses atau keberhasilan jangka panjang pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Suwanto dalam (Masruroh, R., & Nurhayati, 2016) mengatakan bahwa pariwisata sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk kegiatan yang menghasilkan upah. Sehingga pariwisata adalah perjalanan untuk memenuhi hasrat dan keingintahuan akan kepentingan yang berhubungan dengan kesenangan. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau berkunjung ke tempat tersebut. Salah satu pariwisata yang sangat indah dan mampu menarik minat wisatawan di Kabupaten Bone Bolango yakni Pantai Botutonuo.

Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan cukup baik dimana penjabarannya disajikan berikut ini:

Pada aspek sumber daya sudah cukup baik dimana untuk kemampuan sudah baik, sementara anggaran dan fasilitas belum memadai

Pembangunan sebuah lokasi wisata yang tidak disertai dengan kemampuan dalam merencanakan, mengelola serta mengoperasikan dengan baik akan sulit bagi pihak pengelola untuk mencapai tujuan dari didirikannya wisata tersebut, seperti minimnya kunjungan wisatawan karena obyek wisata dan atraks wisata yang dikembangkan kurang menarik, hal ini dapat mempengaruhi laba yang diperoleh pihak pengelola wisata. Untuk itu strategi pengembangan untuk membuat konsep wisata sangatlah penting dalam mengembangkan tempat wisata agar selalu diminati oleh wisatawan dan

tertarik dengan obyek wisata tersebut serta mau membeli/mencoba produk yang dimiliki.

Hal ini sebagaimana menurut (Yoeti, 2016) bahwa pembangunan sebuah lokasi wisata yang tidak disertai dengan kemampuan dalam merencanakan, mengelola serta mengoperasikan dengan baik akan sulit bagi pihak pengelola untuk mencapai tujuan dari didirikannya wisata tersebut, seperti minimnya kunjungan wisatawan karena obyek wisata dan atraks wisata yang dikembangkan kurang menarik, hal ini dapat mempengaruhi laba yang diperoleh pihak pengelola wisata. Untuk itu strategi pengembangan untuk membuat konsep wisata sangatlah penting dalam mengembangkan tempat wisata agar selalu diminati oleh wisatawan dan tertarik dengan obyek wisata tersebut serta mau membeli/mencoba produk yang dimiliki. Wisata yang terus berkembang akan mampu mempertahankan intensitas kunjungan dari masyarakat yang sudah mengenal wisata tersebut.

Pada aspek sikap pelaksana sudah baik dimana seluruh stakeholder dan masyarakat memiliki sikap dan komitmen yang tinggi untuk pengembangan wisata

Disposisi atau sikap pelaksana dilihat dari komitmen seluruh pelaksana dalam pengembangan pariwisata ini, dimana untuk sikap dan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yakni masih beragam dimana untuk pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan DPRD Kabupaten Bone Bolango masih minim perhatian pada pengembangan wisata ini namun untuk pemerintah desa terus berkomitmen dalam pengembangan wisata namun memang anggaran yang ada masih terbatas. Kemudian sikap dan komitmen masyarakat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih harus terus ditingkatkan meskipun sudah dalam keadaan yang baik karena selama ini masyarakat terus berupaya melakukan inovasi yang baik dimana pada tahun 2017 masyarakat membuat spot wisata pendakian gunung yang secara otomatis menarik pula minat bagi wisatawan untuk datang ke wisata Pantai Botutonuo. Serta kemampuan kerja sama dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih belum maksimal karena pengembangan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango masih bersifat parsial antar setiap stakeholder dalam pengembangan wisata tersebut sehingganya kerja sama yang telah terjalin ini harus dijabarkan dalam pemetaan langkah kerja yang lebih nyata dan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Suranto (2014: 38) bahwa disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif,

maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dicermati dalam disposisi pelaksana adalah komitmen dan integritas untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan pengembangan dan pembangunan dengan baik.

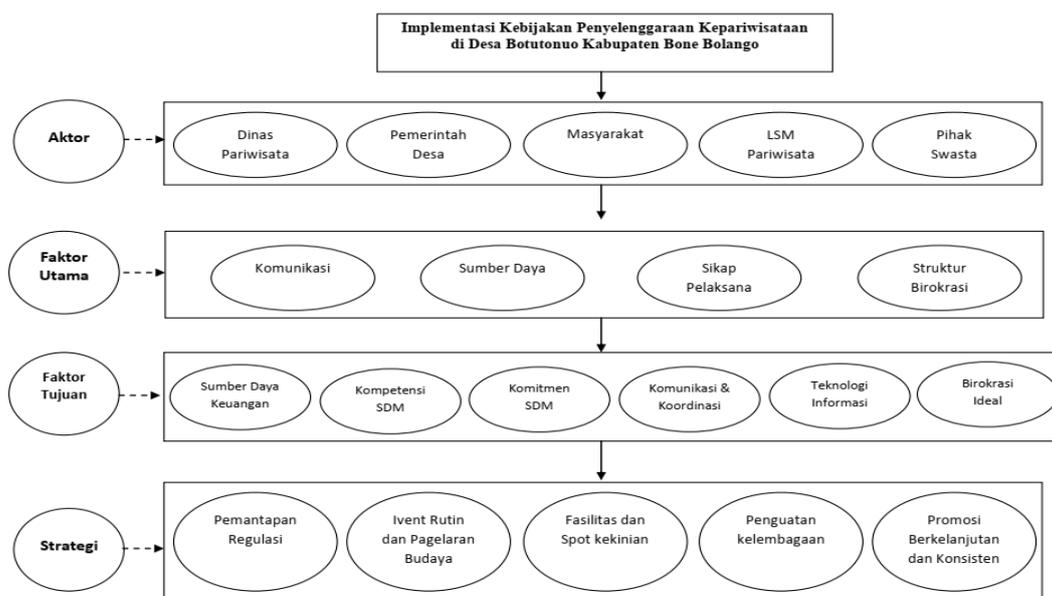
Untuk struktur birokrasi sudah baik karena setiap stakeholder memiliki peran yang sesuai dan pemanfaatan keaja sama dengan swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata pantai Botunuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Terkait dengan struktur birokrasi maka yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan dalam sebuah kebijakan tersebut, dimana penguatan kelembagaan untuk wisata sangatlah penting terutama suatu wisata yang dikelola secara kelembagaan oleh BUMDES atau lembaga lainnya di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini sebagaimana menurut Meiske (2014), upaya peningkatan daya guna dan hasil guna bantuan pembangunan desa telah mendorong bahkan menggerakkan swadaya gotong royong serta menumbuhkan otaktivitas masyarakat dalam pembangunan desa, bantuan ini sangat penting dan bermanfaat untuk pembangunan, ternyata rangsangan riil telah membawa dampak positif bagi masyarakat desa, terutama dalam hal memobilisasi potensi desa seperti dana, tenaga, dan pikiran yang dimilikii masyarakat. BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat desa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Dunggio & Ismail, 2020), BUMDES ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, substansi dan filosofi BUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya.

(Asnawi Manaf, 2013) mengatakan bahwa pelaku utama di dalam kegiatan pariwisata terutama wisata budaya dan adat istiadat ini adalah masyarakat pelaku wisata. Dana PNPM Mandiri Pariwisata diberikan untuk memfasilitasi masyarakat pelaku wisata atau embrio aktivitas masyarakat yang menjadi daya tarik wisata. Sehingga masyarakat pelaku wisata ini secara mandiri, merencanakan, mengalokasikan dan mengelola dana yang mereka dapat dan menggunakannya sebagai alat untuk mensupport dalam pekerjaan menjadi pelaku wisata. Pemerataan pemanfaatan Dana PNPM Mandiri Pariwisata di Desa ini cukup terbilang merata dan menyentuh langsung masyarakat pelaku wisata dan pokdarwis sebagai komunitas yang membina saja. Selain itu realisasi dana PNPM Mandiri Pariwisata ini juga sangat bagus, karena realisasi

berdasarkan embrio (kegiatan masyarakat yang sudah berjalan dan menjadi daya tarik wisata). Sehingga menyebabkan desa ini menjadi lebih layak jual, kreatif dan menjadi destinasi wisatawan seperti saat ini

Berdasarkan hasil tersebut berikut ini digambarkan hasil keseluruhan dari implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango yakni:



Gambar 3. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan gambar 3, implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango harus melibatkan seluruh pihak dimana strategi dalam pembangunan yang berbasis komunitas merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif. (Soetomo, 2010) dengan demikian, strategi ini mengarah kepada penguatan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan local. Obyek wisata ini memunculkan sebuah tantangan pada generasi sekarang, Agar kiranya mampu mengembangkan dan mengelola potensi wisata tersebut. Sehingga tempat wisata tersebut dapat dijadikan sebagai sarana pendapatan bagi masyarakat setempat. Wisata pantai di Desa Botutonuo adalah wisata yang hanya di kelola oleh masyarakat tanpa campur tangan dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan hal demikian dapat

membuat peluang besar untuk mengelola wisata pantai tersebut dan menciptakan lapangan kerja, dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat (Daud Maku, 2018).

Sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai menggalakkan program pembangunan pariwisata di berbagai daerah sekaligus menempatkannya sebagai pendekatan pembangunan alternatif (*alternative development*) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai solusi dalam mengatasi pengangguran. Semua ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai salah satu stakeholders pembangunan yang pada prinsipnya memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan pariwisata di daerah masing-masing. Keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata menjadi salah satu faktor penting, karena masyarakatlah yang memahami dan menguasai wilayahnya (Ahmad et al., 2022; Elina Elfianita, 2016).

Pembangunan wilayah Bone Bolango, dapat dikatakan bahwa "arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Upaya mendukung dan menerapkan arah kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dalam beberapa tahun belakang ini berupaya membangun pariwisata dengan melibatkan masyarakat. Pertemuan, sosialisasi hingga program-program pembangunan pariwisata di upayakan untuk melibatkan masyarakat lokal yang berada di destinasi, Tujuannya adalah untuk memajukan kehidupan masyarakat tersebut secara perekonomian. Diharapkan masyarakat dapat mandiri dalam mengelola destinasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal senada dikatakan Rahman dan Tjokropandojo dalam (Krishna Anugrah, 2017) bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok, salah satunya adalah (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (2) Menghapus kemiskinan (3) Mengatasi pengangguran (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Syaukani dkk, 2006) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk

didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Suatu kebijakan menjadi lebih baik ketika dibarengi dengan komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap dan komitmen pelaksana yang ideal dan struktur birokrasi yang fleksibel.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah; (1) aspek komunikasi menjadi hal yang sangat krusial untuk dibenahi karena komunikasi dalam pengembangan wisata antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat belum terjalin dengan baik; (2) aspek sumber daya sudah cukup baik dimana untuk kemampuan sudah baik, sementara anggaran dan fasilitas belum memadai; (3) aspek sikap pelaksana sudah baik dimana seluruh stakeholder dan masyarakat memiliki sikap dan komitmen yang tinggi untuk pengembangan wisata; (4) untuk struktur birokrasi sudah baik karena setiap stakeholder memiliki peran yang sesuai dan pemanfaatan kerja sama dengan swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata pantai Botutonuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Saran

Perlunya pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan langkah strategi yang dilakukan berdasarkan proses manajemen terpadu pada pengembangan wisata seperti melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pengembangan wisata; Pemerintah dan masyarakat harus lebih optimal dalam komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi terutama media sosial dalam rangka untuk mempromosikan wisata dengan berbagai kelebihan alat promosi yang ada dalam media sosial; Pemerintah perlu menawarkan konsep keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif dengan mengacu pada upaya-upaya mempromosikan destinasi secara bertanggung jawab (*responsible*) yang tujuannya adalah memaksimalkan benefit bagi masyarakat lokal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemasaran suatu destinasi tidak hanya diorientasikan pada meraih kunjungan yang sebesar-besarnya tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan dan sumberdaya yang tersedia; Perlu adanya kerja sama dengan para investor atau perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bone Bolango agar CSR dari perusahaan diarahkan dalam upaya pembangunan wisata dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wisata di Kabupaten Bone Bolango. Dengan cara ini maka seluruh elemen pelaku ekonomi akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wisata. Untuk penelitian selanjutnya alangkah baiknya meneliti variabel dan indikator pendukung lainnya sehingga Pemerintah Daerah yang mengelola

pariwisata dapat membangun sarana dan prasara yang dapat menjadikan wisatawan lokal maupun asing dapat menikmati keindahan pantai botutonuo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Arman, & Dunggio, S. (2022). Peran Dinas Pariwisata Kota Gorontalo Dalam pengembangan Pariwisata Dimasa Pandemi Covid-19. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 41–56.
- Ali, M., Amil, A., & Zuhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 6–12. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579>
- Ardiansyah, B. K., Rizari, R., & Hamid, H. (2020). Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–10. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1045>
- Asnawi Manaf, H. P. J. P. (2013). *Faktor – Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Di Dataran Tinggi Dieng*. 2(3), 559–568.
- Bachri. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada. Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya.
- Baskoro, J. D. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. 1–54.
- Daud Maku, A. P. (2018). *Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango*. V.
- Dunggio, S., & Ismail, S. D. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15–24.
- Elina Elfianita. (2016). *Pengembangan pariwisata berbasis community based tourism (cbt) di desa wisata limbasari kecamatan bobotsari, kabupaten purbalingga. SI thesis, fakultas ilmu pendidikan*. Universitas Negeri Jogjakarta.
- Feki Lahamadi, Martha Ogotan, V. Y. L. (2015). *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara) Feki Lahamadi Martha Ogotan*. 1–14.
- Indraningsih, G. . K. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA*, 1(1), 31–40. <http://jurnal.stahds.ac.id/jurnalPariwisataPaRAMA/article/view/257/131>
- Krishna Anugrah, I. W. S. (2017). *Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Gorontalo*. 4, 33–46.

- Lisa, E. N., Paturusi, S. A., & Oka Prasiasa, D. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 4, 151–167. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2017.v04.i02.p11>
- Lubis, F. S. (2021). *Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata Terhadap Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15334>
- Masruroh, R., & Nurhayati, N. (2016). *Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK*, 124-133.
- PERDA Bone Bolango No 12 th 2017 ttg Penyelenggaraan Kepariwisataaan.pdf. (n.d.).
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementation of Sustainable Tourism Development Policies in Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar.
- Suastika, I. M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Dan Upaya Pemulihan Pariwisata. *Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, 1(1), 41–51. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/sista/article/download/1445/1136>
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syaukani dkk. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan*, (cetakan II). Pustaka Pelajar.
- UU RI Nomor 10. (2009). *Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataawan*.
- Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT.Pradya Paramitha.